



RENCANA KERJA TAHUNAN 2026

DISUSUN OLEH :
STASIUN PPMHKP JAMBI



Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya*” maka Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi ikut mewujudkan misi Stasiun PPMHKP yaitu :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hamadan penyakit

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Jambi untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana Kerja Tahunan Stasiun PPMHKP Jambi Tahun 2026 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan sistem keamanan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai Stasiun PPMHKP Jambi Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Tahunan Stasiun PPMHKP Jambi Tahun 2026 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Jambi, 8 Januari 2026

Kepala SPPMHKP Jambi



Piyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, M.H

NIP. 19780824 200502 1 001



Daftar Isi

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Grafik

1. Pendahuluan.....	1
1.1. Tugas dan Peran Organisasi	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Sasaran	2
2.1. Rencana Strategis	3
2.2. Arah Kebijakan	5
2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	6
2.3.1 Sasaran Strategis	6
2.3.2. Indikator Kinerja.....	7
2.4. Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun PPMHKP Jambi.....	10
3. PENUTUP	13



Daftar Grafik

Grafik 1.	Alokasi Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi Per Jenis Kegiatan	10
Grafik 2.	Alokasi Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi Per Kegiatan dan Per Jenis Belanja	12

1. Pendahuluan

1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian ditindaklanjuti dalam Kepmen KP Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja KKP. Peranan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrument menjaga jaminan mutu perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan diwujudkan dalam menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia.

Stasiun PPMHKP Jambi dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen Pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/ hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangansistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Dengan demikian peran Stasiun PPMHKP sangat strategis dalam ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Stasiun PPMHKP Jambi tahun 2026 serta memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tahun 2026.

1.3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan 2026 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi adalah tersedianya Rencana Kerja Tahunan Stasiun PPMHKP Jambi Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut dari RPJM Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 serta memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tahun 2026.

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong””**.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata.

Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat serta menetapkan misi antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Penigkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Selain itu KKP mempunyai program Prioritas yang disebut dengan Agenda Prioritas KKP dengan 5 Kebijakan, Agenda Prioritas KKP dengan 5 Kebijakan antara lain:

1. Memperluas Kawasan konservasi laut
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan Pengendalian kawasan pesisir dan pulau pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut

Kontribusi pengendalian mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan global sertanasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat,bermutu dan aman dikonsumsi.

2.1.2 Tujuan Strategis

Tujuan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Stasiun PPMHKP adalah: “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong” dengan sasaran:

1. Meningkatnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor, dan antar area).
2. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
3. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor.

2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang Pengawasan dan Pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi Stasiun PPMHKP Jambi dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2025-2029, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan melalui strategi:
 - a. Meningkatkan nilai PNBPN Stasiun PPMHKP Jambi Tahun 2026
2. Terselenggaranya sistem mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - a. Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar
 - b. Sertifikasi HACCP hasil perikanan
 - c. Unit Kinerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu
 - d. Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
 - e. Pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan di wilayah RI
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Pengelolaan sumberdaya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis Kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

2.3.1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan seiring dengan implementasi Kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Stasiun PPMHKP Jambi tersebut dibagi dalam empat perspektif antara lain :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan, dengan indikator Kinerja yaitu :
 - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)
 - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SPPMHKP Jambi (%)
 - c. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)
2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar Yaitu :
 - a. Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)
3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan , dengan indikatorKinerja yaitu :
 - a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Indeks)
 - b. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)
 - c. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)
 - d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Persen)

- 
- e. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)
 - f. Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)
 - g. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)
 - h. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (indeks).

7

2.3.2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pada tahun anggaran 2026. Indikator Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan seiring dengan implementasi Kinerja UPT berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) adalah dengan empat perspektif utama, antara lain:

1. Perspektif keuangan
2. Perpektis pelanggan
3. Perspektif proses bisnis
4. Perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan

Tabel 1. Indikator Kinerja SPPMHKP Jambi tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SPPMHKP Jambi (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SPPMHKP Jambi (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	4.	Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	71
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Jambi	5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	86,2
		8.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	92,1
		10.	Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (indeks).	3,5

Dalam mewujudkan target indikator Kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan Kinerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Manajemen Mutu
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pengendalian Mutu diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambak sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

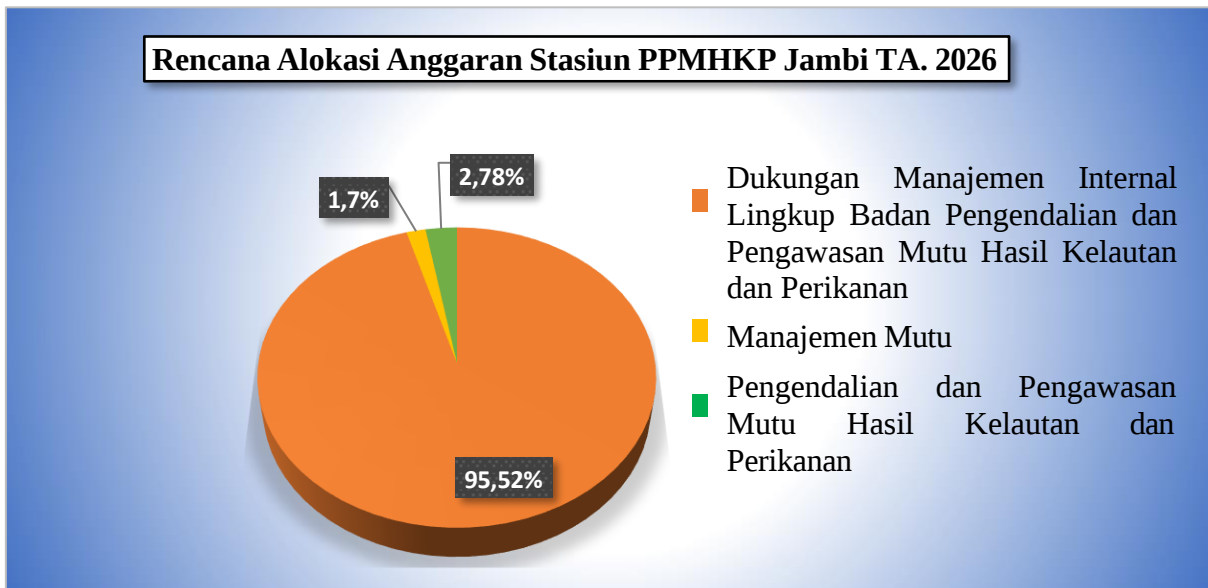
Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit Kinerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan rikanan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

2.4. Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun PPMHKP Jambi

Rencana Kinerja dan anggaran Stasiun PPMHKP Jambi tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target-target Kinerja pengendalian mutu dan pengawasan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana Kinerja Stasiun PPMHKP Jambi dalam Mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp.4,088,114,000-

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun PPMHKP Jambi tahun 2026 untuk mewujudkan target-target Kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 sebagai berikut.

Grafik 1. Alokasi Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi per jenis KRO



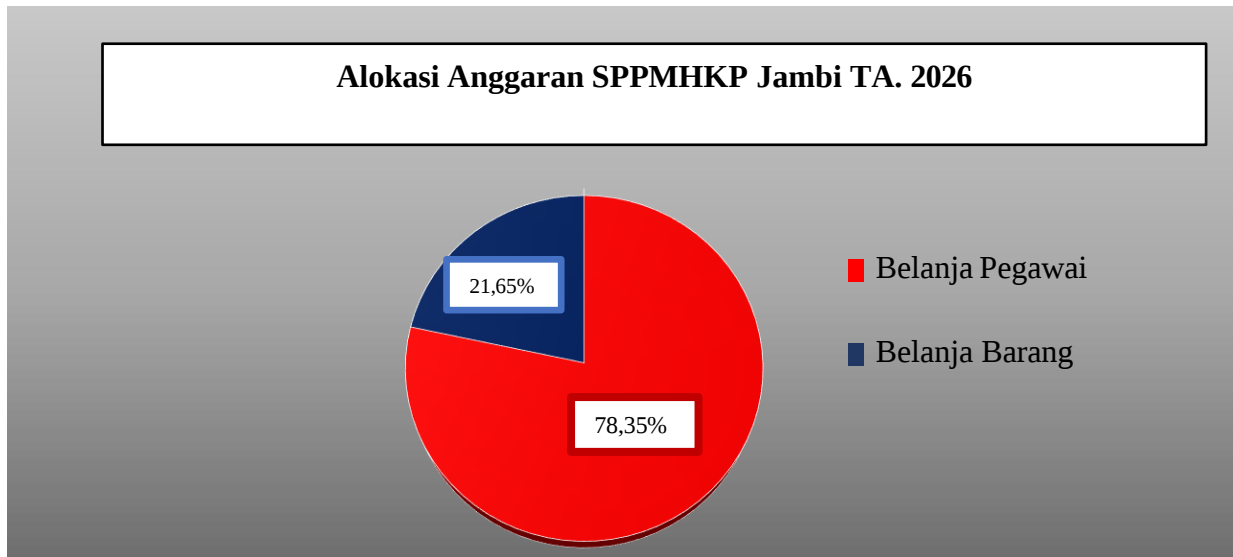
Total rencana alokasi anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi pada tahun 2026 sebesar Rp. 4,088,114,000,-Alokasi anggaran berdasarkan indikator kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 3.905.076.000,- (95,52 %)
2. Kegiatan Manajemen Mutu sebesar Rp. 69.500.000,- (1,70 %)
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 113.538.000,- (2,78 %)

Sedangkan rincian masing-masing kegiatan dituangkan dalam Rincian Output (RO) kegiatan pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi, terdiri dari :

1. Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi sebesar Rp.64.527.000
2. Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi Rp. 37.011.000
3. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya sebesar Rp. 6.000.000
4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp.5.000.000
5. Unit Produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sebesar Rp1.000.000,-
6. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan sebesar Rp. 42.500.000
7. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium sebesar Rp.27.000.000
8. Layanan Umum sebesar Rp. 62.888.000
9. Layanan Perkantoran sebesar Rp. 3.842.188.000

Grafik 2. Alokasi anggaran Stasiun pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Jambi per jenis belanja



Total rencana alokasi anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi pada tahun 2026 sebesar Rp. 4.088.114.000,-. Alokasi anggaran tersebut berdasarkan jenis belanja terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.202.890.000 atau sebesar 78,35 %
2. Belanja Barang sebesar Rp. 885,224.000 atau sebesar 21,65 %
3. Belanja Modal sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %

3. PENUTUP

Program Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada TA 2026 pada Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi diimplementasikan dalam rangka penerapan Kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program tersebut ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
5. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan secara professional dan partisipatif.
6. Terwujudnya aparatur sipil negara pada Stasiun Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi yang kompeten, profesional dan berintegritas
7. Tersedianya manajemen pengetahuan pada Stasiun Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi yang handal dan mudah diakses
8. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) pada Stasiun Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi secara efisien dan akuntabel

Total alokasi anggaran tahun 2026 Stasiun Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi adalah sebesar Rp. 4.088.114.000,-. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.202.890.000 atau sebesar 78,35 %
2. Belanja Barang sebesar Rp. 885.224.000 atau sebesar 21,65 %
3. Belanja Modal sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%

Sedangkan rincian alokasi anggaran Alokasi anggaran berdasarkan indikator kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 3.905.076.000,- (95,52 %)
2. Kegiatan Manajemen Mutu sebesar Rp. 69.500.000,- (1,70 %)
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 113.538.000,- (2,78 %)

Demikian Rencana Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi Tahun Anggaran 2026 dalam mewujudkan “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*”.